

Peran Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Meningkat Fasilitas Pembangunan Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat

Renhard G. Kolomsusu¹

¹ Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Agustus 22, 2024

Revised Agustus 22, 2024

Accepted Agustus 22, 2024

Kata Kunci:

Peran Badan Perusyawaratan
Kampung,
Meningkatkan Fasilitas
Pembangunan Kampung

Keywords:

*The Role of The Village
Consultative Body,
Improving Village
Development Facilities*

ABSTRAK

Penelitian mengkaji peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam meningkatkan fasilitas pembangunan di Kampung Yenbeser, Distrik Saunek, Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana BPK berkontribusi dalam proses pembangunan kampung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dan berperan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kampung. BPK membentuk panitia pemilihan kepala kampung, menyusun rencana pembangunan bersama pemerintah kampung, dan memastikan aspirasi masyarakat disalurkan dengan baik. Dukungan masyarakat dan kerjasama yang harmonis antara BPK dan pemerintah kampung merupakan faktor pendorong utama, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tunjangan, dan kurangnya sarana prasarana menjadi hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran BPK sangat bergantung pada adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta penyediaan sumber daya yang memadai. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan mekanisme dan strategi pembangunan kampung di masa depan.

ABSTRACT

influence the effectiveness of these decisions. The method used is qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that the BPK functions as a forum for collecting community aspirations and plays a role in planning and implementing village development. The BPK formed a village head election committee, prepared development plans with the village government, and ensured that community aspirations were channeled properly. Community support and harmonious cooperation between the BPK and the village government are the main driving factors, while limited human resources, lack of allowances and lack of infrastructure are obstacles. This research concludes that the effectiveness of the BPK's role is very dependent on the support and active participation of the community and the availability of adequate resources. It is hoped that these findings will provide insight into improving village development mechanisms and strategies in the future.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Renhard G. Kolomsusu
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,
Sorong, Indonesia
Email: rein2982@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, wilayah dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dengan kampung atau kelurahan sebagai tingkatan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintahan kampung berfungsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten (Roucek dan Warren dalam Arifin, [1]) Sebagai ujung tombak pemerintah daerah, pemerintah kampung berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan, khususnya pemerintahan kampung, harus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap perubahan masyarakat [2]. Reformasi dan otonomi daerah memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kampung untuk mengembangkan kampung sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Bagi banyak aparat pemerintah kampung, otonomi merupakan peluang baru untuk mengelola kampung dengan lebih kreatif. Misalnya, sebelumnya segala rencana pemerintah kampung harus mendapatkan persetujuan distrik, namun kini hal tersebut tidak lagi berlaku [3]

Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah kampung dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sisi masyarakat, otonomi daerah membawa manfaat berupa transparansi pengelolaan pemerintahan kampung dan penyederhanaan birokrasi, yang berdampak positif pada pembangunan kampung [4]. Namun, masyarakat juga bisa menjadi penghambat jika ada keputusan yang tidak disetujui. Oleh karena itu, tidak semua kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung dapat diterima oleh semua masyarakat. Respon masyarakat terhadap kebijakan sering kali bervariasi, dan tanggapan yang negatif dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Badan Permusyawaratan Kampung berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung bersama dengan Pemerintah Kampung [5]. Pemerintah Kampung bertugas melaksanakan kebijakan, sedangkan Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan peraturan kampung, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi pemerintahan kampung [6]. Badan Permusyawaratan Kampung juga terlibat dalam perencanaan pembangunan dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Kampung Yenbeser menunjukkan kurangnya pembangunan atau renovasi, seperti kantor kampung, balai kampung, puskesmas, dan dermaga kampung [7]. Hambatan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan SDM

masyarakat yang bervariasi [8]. Oleh karena itu, inovasi dari Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung diperlukan untuk memastikan semua kegiatan dapat terealisasi dan diterima oleh masyarakat [9].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memerlukan peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk mengobservasi dan merasakan langsung kondisi sebenarnya mengenai peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di Kampung Yenbeser, Distrik Saunek, Kabupaten Raja Ampat. Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen tertulis, agar hasil penelitian dapat akurat mencerminkan situasi di lapangan serta informasi yang tertulis dalam dokumen. Selanjutnya, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami realitas di lapangan terkait peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di kampung tersebut.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung lokasi penelitian secara berulang, baik di tempat yang sama atau berbeda. Fokusnya adalah pada pengamatan langsung terhadap isu yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer mengenai peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur kampung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview) dengan berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui kajian dokumen pribadi dan resmi, baik dalam bentuk visual maupun tertulis. Dokumen tersebut mencakup buku, laporan, skripsi, surat kabar, dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, guna mencari konsep dan teori yang berhubungan erat dengan topik yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara non-statistik, dengan pendekatan kualitatif untuk mempelajari masalah penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Proses analisis data mencakup tiga tahapan utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat kampung. BPK menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada instansi atau lembaga terkait. Penampungan keluhan dilakukan melalui dua cara: secara tertulis dan lisan. Keluhan tertulis mengenai pembangunan dan kemajuan kampung akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah kampung, sementara aspirasi lisan disampaikan langsung kepada BPK oleh masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Dan Fungsi Pengawasan BPK Yenbeser

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah tugas utama dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah dilaksanakan di Kampung Yenbeser:

1. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Kampung

Menurut wawancara dengan Bapak Yonathan Wawiyai, Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat kampung. Fungsi ini melibatkan penampungan keluhan masyarakat dan tindak lanjut aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Penampungan keluhan dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Masalah terkait pembangunan kampung yang disampaikan secara tertulis akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah kampung, sementara aspirasi lisan disampaikan langsung kepada BPK.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Menurut wawancara dengan Bapak Yonathan Wawiyai, sebelum pemilihan kepala kampung, BPK membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Bapak Yehuda Dimara menambahkan bahwa panitia pemilihan dibentuk dari tokoh masyarakat, perangkat kampung, dan lembaga kemasyarakatan. Panitia ini bertugas melaksanakan semua kegiatan terkait pencalonan kepala kampung, mulai dari penjarangan bakal calon hingga pemilihan. Tugas panitia termasuk menyosialisasikan pemilihan kepada masyarakat, mendaftarkan bakal calon, menyaring calon kepala kampung sesuai syarat yang ditentukan, dan mengumumkan calon kepada masyarakat.

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua kegiatan terkait pencalonan kepala kampung dan melaporkan hasilnya kepada BPK, dari penjarangan calon hingga terpilihnya kepala kampung.
- b. Membuat sosialisasi di masyarakat mengenai pemilihan kepala kampung dan melakukan pendataan serta pendaftaran bakal calon.
- c. Menyaring bakal calon kepala kampung sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan menetapkan calon kepala kampung.
- d. Mengumumkan calon kepala kampung kepada masyarakat di lokasi yang mudah dijangkau.

3. Proses Perumusan dan Penetapan Pembangunan Kampung

Menurut wawancara dengan Bapak Yonathan Wawiyai, dalam merumuskan dan menetapkan pembangunan kampung, BPK bersama pemerintah kampung (kepala kampung dan perangkat kampung) mengikuti proses berikut:

- a. Pemerintah kampung mengundang anggota BPK untuk membahas rencana pembangunan kampung.
- b. Pemerintah kampung mengajukan rancangan pembangunan kepada BPK.
- c. BPK, kepala kampung, dan tokoh masyarakat memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan pembangunan.
- d. Ketua BPK menyampaikan usulan yang telah disepakati kepada pemerintah kampung untuk agenda berikutnya.
- e. BPK dan pemerintah kampung mengadakan rapat beberapa kali untuk mencapai kesepakatan bersama.

Bapak Yehuda Dimara menambahkan bahwa setelah rancangan pembangunan dibahas dan mengalami perubahan, rancangan tersebut disahkan dan ditetapkan dengan peran penting dari BPK dan kepala kampung.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok BPK

Faktor-Faktor yang Mendorong:

- a. Menurut Bapak Yonathan Wawiyai, dukungan masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan BPK dalam menjalankan fungsinya. Dukungan masyarakat memperluas ruang gerak BPK dan mempermudah pelaksanaan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi dan pelaksanaan keputusan sangat penting.
- b. Bapak Arnolis Dimara menambahkan bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat membantu BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- c. Bapak Wempi Mambrasar menyebutkan bahwa hubungan kerja sama yang harmonis antara BPK dan pemerintah kampung, dengan saling menghargai dan mendukung, merupakan faktor penting untuk kelancaran kinerja BPK.
- d. Ibu Efi A. Mayor menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara BPK dan pemerintah kampung dalam proses pembangunan juga berkontribusi positif.

Faktor-Faktor yang Menghambat:

- a. Bapak Arnolis Dimara mengatakan bahwa tunjangan atau pendapatan mempengaruhi kinerja BPK, dan kurangnya tunjangan dapat menyebabkan anggota mencari pekerjaan sampingan, sehingga menurunkan fokus pada tugas BPK.
- b. Bapak Rein Kolomsusu menyoroti bahwa tunjangan yang minim membuat anggota BPK harus mencari pekerjaan tambahan, yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.
- c. Ibu Adollince Umpes menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana, seperti kantor atau tempat kegiatan administrasi, menghambat kinerja BPK. Fasilitas operasional yang tidak memadai mempengaruhi kelancaran tugas BPK.
- d. Bapak Boy Rumararak menunjukkan bahwa kekurangan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya kantor BPK, menghambat pelaksanaan tugas.
- e. Ibu Adollince Umpes juga mencatat bahwa kurangnya SDM dengan pengetahuan yang memadai tentang tugas BPK dapat menjadi penghambat. Bapak Rein Kolomsusu menambahkan bahwa perbedaan pendapat masyarakat terhadap keputusan BPK juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

4. KESIMPULAN

Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat rendah, sehingga anggota harus mencari pekerjaan sampingan. Hal ini terkadang membuat mereka kurang fokus pada tugas mereka. Tunjangan untuk anggota BPK dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka, karena gaji dan tunjangan hanya berasal dari dana operasional kampung yang diterima dari pemerintah, dan jumlahnya tidak konsisten setiap bulan. Untuk mendukung kinerja anggota BPK, diperlukan sarana dan prasarana seperti kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus untuk BPK sebagai pusat administrasi, seperti lembaga legislatif lainnya, serta kurangnya fasilitas operasional, mempengaruhi kelancaran

kinerja BPK. Meskipun BPK bekerja dalam skala kampung, hal ini tetap berpengaruh. Salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK di Kampung Yenbeser adalah rendahnya kualitas SDM, dengan sebagian anggota yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka. Oleh karena itu, diperlukan arahan dan bimbingan dari pihak berwenang, seperti dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan lembaga kampung, agar anggota BPK memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai pemerintahan, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan pemerintah kampung. BPK harus memahami kondisi masyarakat yang beragam, karena masyarakat bisa menjadi pendukung maupun penghambat. Perbedaan dalam tingkat pendidikan dan SDM masyarakat memerlukan inovasi dari BPK agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Setelah menampung aspirasi masyarakat, langkah berikutnya adalah BPK menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan yang diadakan oleh BPK. Setelah membahas aspirasi, BPK akan meneruskan dan menyampaikannya sesuai harapan masyarakat. Pemerintah kampung juga diberi kesempatan untuk menjelaskan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. BPK telah berkolaborasi dengan kampung lain untuk mengembangkan potensi kampung melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. BPK juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian kegiatan yang memberikan dampak positif. Proses ini melibatkan perencanaan pembangunan dan kegiatan jaring aspirasi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Karena masih banyak program pembangunan kampung yang belum dilaksanakan, penting untuk mempertahankan kerjasama yang baik antara Kepala Kampung dan BPK. Dengan menjaga kerjasama, diharapkan program-program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- [1] Dewi, Irlina, Titin Sumarni, and Indra Indra. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan." *Jurnal Yustisiabel* 4.2 (2020): 118-127.
- [2] Firman, Firman. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 (2020): 39-52.
- [3] *Governance Opinion* 7.2 (2022): 78-93. Ginting, Joya Hanafi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis). *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.*
- [4] Jangkup, Margaritha Nuboba. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, 2023.*
- [5] Kumeidi, M. Kholil. Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. *Diss. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2021*
- [6] Mandasari, Jayanti. "Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." (2016).
- [7] Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, 400-414.

- [8] (N.d.). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/101418-ID-kualitas-pelayananpemerintahan-desastu.pdf>.
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/8250/SUTINAR%20SINAGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [9] Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 180-197.